

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Diantara sumber pendapatan asli daerah, pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan yang potensial dan sangat penting bagi daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Di samping penerimaan yang berasal dari pemerintah yang berupa subsidi atau bantuan bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Adanya pemberlakuan otonomi daerah di seluruh Indonesia, termasuk juga di Provinsi Riau secara langsung hal tersebut juga akan mempengaruhi kebijakan dalam pengaturan keuangan daerah. Dimana daerah diberi wewenang yang lebih luas dalam mengelola keuangannya. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa daerah berhak mengatur keuangannya sendiri berdasarkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya masing-masing, di samping pemberia subsidi dari pemerintahan pusat dalam rangka perimbangan dana keuangan pusat dan daerah di Provinsi maupun daerah Kabupaten dan Kota.

Agar dapat menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan di daerah, maka Pemda harus mempunyai keuangan sendiri. Di dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 157 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan asli daerah, yang Terdiri dari :
1. Hasil pajak daerah
  2. Hasil retribusi daerah
  3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
  4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- b. Dana Perimbangan terdiri dari :
1. Bagian daerah dari peberimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam
  2. Dana alokasi umum
  3. Dana alokasi khusus
- c. Pinjaman daerah
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Tabel1.1: Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2017 (Rp).

No	Jenis penerimaan PAD	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pajak daerah	12.898.121.724	15.603.937.522	19.178.969.035	20.239.552.849	23.591.302.991
2	Retribui daerah	12.133.096.728	23.986.658.229	23.642.960.181	15.434.274.681	19.795.669.199
3	Pengelola kekayaan daerah	3.243.465.848	4.033.908.951	4.740.308.970	2.656.132.358	3.938.586.567
4	Lain-lain PAD yang sah	17.997.342.050	18.075.203.295	22.813.547.999	16.243.974.136	13.363.393.022
Julah PAD		46.272.026.350	61.699.708.628	70.375.786.187	54.537.934.025	60.688.951.780

Sumber: Badan pendapatan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2017.

Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa realisasi penerimaan pendapatan asli daerah secara keseluruhan setiap tahunnya mengalami peningkatan ataupun mengalami penurunan. Pada tahun 2013 penerimaan

pendapatan asli daerah sebesar Rp.46.272.026.350 begitu juga pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp.61.699.708.628 dan pada tahun 2015 penerimaan pendapatan asli daerah mengalami peningkatan menjadi Rp.70.375.786.187 pada tahun 2016 terjadi penurunan penerimaan pendapatan asli daerah menjadi Rp. 54.573.934.025 kemudian pada tahun 2017 penerimaan pendapatan asli daerah mengalami peningkatan menjadi Rp. 60.688.951.780. Pada tahun 2016 penerimaan retribusi daerah turun drastis dari Rp. 23.642.960.181 menjadi Rp. 16.434.274.681, hal ini disebabkan kinerja jajaran Pemkab Kabupaten Kuantan Singingi masih lemah, dan berbagai kendala yang terjadi di lapangan sehingga penerimaan dari retribusi daerah turun drastis.

Dengan melihat isi Undang-undang No.32 pasal 157 tahun 2004 tersebut, maka jelaslah bahwa hasil dari retribusi daerah adalah juga merupakan bagian dari pendapatan asli daerah. Sehingga pendapatan asli daerah juga merupakan sumber penerimaan yang diterima oleh penerimaan daerah.

Dalam arti lain, menurut Hirawan (1991: 170-171) jelas pemerintah daerah sering mengalami tiga masalah utama yaitu:

1. Adanya ketergantungan yang sangat besar dari daerah (terutama daerah Kabupaten) pada pemerintah pusat karena keterbatasan kemampuan daerah dalam membiayai tugas-tugas daerah.
2. Peranan dari bantuan atau sumbangan yang semakin besar dalam belanja daerah.
3. Kekaburan mengenai tingkat pemerintah mana yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah.

Oleh karena itu kepala daerah telah diberi hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri oleh pemerintah pusat, maka daerah berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan dan kegiatan pembangunan untuk dapat memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut perlu didukung dengan dana yang cukup, baik dengan menggunakan sumber-sumber keuangan yang ada maupun dengan menggali sumber-sumber keuangan yang baru.

Salah satu langkah yang penting dan segera dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah yang pada dasarnya terdiri dari unsure-unsur hasil penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan daerah, penerimaan dinas-dinas daerah lain-lain usaha daerah yang sah. Kamaluddin, (1992;47).

Oleh sebab itu penerimaan retribusi daerah yang diperoleh oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi sangat mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan regional banyak kota-kota yang berkembang dengan cepat sekali. Perkembangan kota serta kebutuhan akan jasa perotaan dari berbagai unsur sarana yang diperlukan dalam sector ini di sertai dengan biayanya. Kebutuhan akan jasa perkotaan diantaranya adalah pasilitas pasar, pemerintah telah mengembangkan pasar-pasar melalui program inpres pasar. Adanya program inpres ini menandakan bahwa sumber daya keuangan daerah belum atau tidak memadai, untuk mengadakan berbagai jasa perkotaan pada berbagai sektor.

Di dalam retribusi daerah terdapat beberapa retribusi diantaranya adalah retribusi pasar. Karena dengan adanya retribusi yang dikenakan terhadap para pedagang, maka akan memberikan suatu tambahan hasil terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Retribusi yang dikenakan terhadap para pedagang diantaranya adalah sewa kios, los dan lapak-lapak yang diperlukan oleh pedagang untuk menjual barang dagangannya. Gambaran tarif yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kepada pedagang pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 1.2 : Tarif Retribusi Pasar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017.

No	Jenis retribusi	Besarnya tarif (Rp) / hari & bulan
1	Kios	100.000 (bulan)
2	Los	4.000 (hari)
3	Lapak-lapak	2.000 (hari)

Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Kuantan Singingi, 2018

Oleh karena itu mengingat arti pentingnya retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kuantan Singingi, maka penulis akhirnya menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”.

## 1.2. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Bagaimana kontribusi retribusi pasar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Kuantan Singingi ?

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi besarnya kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kuantan Singingi ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Kuantan Singingi .
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Membe;rikan informasi bagi pemerintah daerah atau instansi lain yang terkait sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang di bidang retribusi pasar.
2. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama ataupun pengembangan dari penelitian ini.
3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama di bangku perkuliahan.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis proposal ini maka penulis mengemukakan sistematika penulis sebagai berikut :

## BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta systematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESA

Dalam bab ini dibahas mengenai beberapa landasan teori dan hipotesa.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dibahas mengenai metodologi penelitian, pada bab ini akan diuraikan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian yang meliputi lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data.

## BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum daerah penelitian, pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran daerah penelitian yang meliputi letak dan keadaan geografis, luas wilayah, penduduk dan perkembangan, sistem sosial, keuangan daerah penelitian.

## BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil dari penelitian dan pembahasan yang diselesaikan penulis.

## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai beberapa kesimpulan dan saran.